

**PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA,
AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN DESA DI DESA TANDUN BARAT
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

**OLEH :
RAMAYU VANVIORA
NPM: 18.833.0092**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/6/23

**PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA,
AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN DESA DI DESA TANDUN BARAT
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

**OLEH :
RAMAYU VANVIORA
NPM: 18.833.0092**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/6/23

**PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA,
AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN DESA DI DESA TANDUN BARAT
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area

OLEH :

**RAMAYU VANVIORA
NPM: 18.833.0092**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/6/23

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu

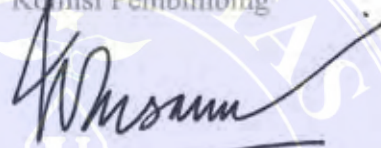
Nama : Ramayu Vanviora

NPM : 18.833.0092

Program Study : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

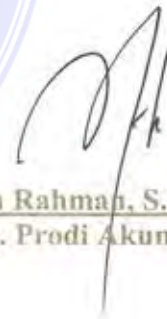


Warsani Purnama Sari, SE, Ak, MM
Pembimbing

Mengetahui:



Ahmad Rafik, SBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA
Dekan



Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak
Ka. Prodi Akuntansi


Tanggal/Bulan/Tahun Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA TANDUN BARAT KABUPATEN ROKAN HULU", saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan,


Andriyana Vanviora
NPM: 18.833.0092

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ramayu Vanviora
NPM : 18.833.0092
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-ekclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah yang berjudul: "Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Februari 2023
menyatakan,



10000
RUMAH
TEPAK
BCEAKX452293481

Ramayu Vanviora
NPM: 18.833.0092

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of transparency, accountability and community participation on the management of village fund allocation partially and simultaneously on village development in Tandun Barat Village, Rokan Hulu Regency. The type of research used in this research is quantitative research. The population in this study was the people of West Tandun Village as many as 2,467 people. In this study the number of samples was 100 people, who had the following criteria: age 20-50 years, minimum education of high school and above and permanent village residents. Sources of data in this study using primary data. Methods of data collection using a questionnaire. Sampling using the Slovin method. The data analysis technique used in this research is descriptive statistical test, data quality test, classical assumption test, multiple linear regression test and hypothesis testing with the help of SPSS software. The results of this study indicate that transparency has a positive effect on village development in Tandun Barat Village, Rokan Hulu Regency. Accountability has a positive effect on village development in Tandun Barat Village, Rokan Hulu Regency. Community participation has a positive effect on village development in Tandun Barat Village, Rokan Hulu Regency. Simultaneously, transparency, accountability and community participation in the management of village fund allocations have a positive effect on village development in Tandun Barat Village, Rokan Hulu Regency.

Keywords: Transparency, Accountability, Community Participation, Village Fund Management, Village Development

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan alokasi dana desa, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara parsial dan simultan terhadap pembangunan desa pada Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tandun Barat sebanyak 2.467 orang. Dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 100 orang, yang memiliki kriteria sebagai berikut: usia 20-50 tahun, pendidikan minimal SMA keatas dan warga desa tetap. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penarikan sampel dengan metode *Slovin*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan bantuan *software* SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa pada Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa pada Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa pada Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu. Secara simultan transparansi pengelolaan alokasi dana desa, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa pada Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu.

Kata Kunci: **Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Desa**

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tandun Barat pada tanggal 09 Oktober 1999 dari ayah Rumbun Sitanggung dan Ibu Br. Hutabarat. Penulis merupakan putri pertama dari tiga bersaudara. Pada tahun 2006-2012 penulis menempuh pendidikan di SDN 004 Tandun Barat, tahun 2012-2015 penulis menempuh pendidikan di SMPN 1 Ujung Batu dan tahun 2015-2018 penulis menempuh pendidikan di SMKN 1 Ujung Batu dan pada Tahun 2018 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Selama mengikuti perkuliahan, penulis lolos menjadi Mahasiswa Kampus Mengajar pada program Merdeka Belajar Kampus Mengajar (MBKM) yang diadakan oleh Kemdikbud.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu”.

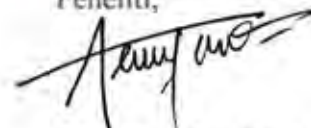
Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Msc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D,CIMA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Medan Area .
4. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, AK, MM., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing penulis, dan selalu memberikan saran-saran yang baik.

5. Ibu Dr. Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak saran dan pengarahan kepada peneliti.
6. Ibu Aditya Amanda Pane, SE., M.Si., selaku Dosen Sekretaris yang telah memberikan saran dan pengarahan kepada penulis
7. Kepala Desa, Perangkat Desa serta BPD Tandun Barat yang sudah membantu saya selama riset di Desa Tandun Barat.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Bapak (Rumbun Sitanggung) dan Mamak (Kelmida Br. Hutabarat). Terima kasih untuk doa dan dukungan serta kasih sayangnya.
9. Seluruh teman organisasi penulis (HIMAKSI dan HMK) dan teman - teman seperjuangan kelas Akuntansi A2 angkatan 2018.

Semoga diberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwasannya Skripsi ini belum sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan serta penelitian selanjutnya. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih.

Medan, Februari 2023
Peneliti,



Ramayu Vanviora
NPM. 18.833.0092

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory).....	6
2.1.2 Definisi Desa	8
2.2 Transparansi	14
2.2.1 Pengertian Transparansi	14
2.2.2 Indikator Transparansi	15
2.3 Akuntabilitas	16
2.3.1 Pengertian Akuntabilitas	16
2.3.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas	17
2.3.3 Indikator Akuntabilitas	17
2.4 Partisipasi Masyarakat.....	18
2.4.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	18
2.4.2 Manfaat Penerapan Partisipasi	19
2.4.3 Indikator Partisipasi Masyarakat	19
2.5 Pembangunan Desa	20
2.5.1 Pengertian Pembangunan Desa	20
2.5.2 Indikator Pembangunan Desa.....	22
2.6 Penelitian Terdahulu	24
2.7 Kerangka Konseptual	25
2.8 Hipotesis Penelitian.....	26
2.8.1 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa	26
2.8.2 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa	26
2.8.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa.....	27
2.8.4 Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap	

	Pembangunan Desa	28
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1	Jenis, Tempat Dan Waktu Penelitian	29
3.1.1	Jenis Penelitian	29
3.1.2	Lokasi Penelitian	29
3.1.3	Waktu Penelitian	29
3.2	Populasi Dan Sampel	30
3.2.1	Populasi	30
3.2.2	Sampel	30
3.3	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	31
3.3.1	Variabel Terikat (Variabel Dependen)	31
3.3.2	Variabel Tidak Terikat (Variabel Independen)	31
3.3.3	Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	32
3.4	Jenis Dan Sumber data	34
3.4.1	Jenis Data	34
3.4.2	Sumber Data	34
3.5	Teknik Analisis Data	34
3.5.1	Uji Validitas	34
3.5.2	Uji Reliabilitas	35
3.6	Metode Analisis Data	35
3.6.1	Uji Asumsi Klasik	35
3.7	Analisis Regresi Linear Berganda	37
3.8	Uji Hipotesis	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.1	Sejarah Singkat Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu	40
4.1.2	Struktur Organisasi Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu	41
4.2	Karakteristik Responden	44
4.2.1	Jenis Kelamin Responden	44
4.2.2	Usia Responden	45
4.2.3	Pendidikan Terakhir Responden	45
4.3	Deskripsi Data Penelitian	46
4.3.1	Transparansi (X1)	46
4.3.2	Akuntabilitas	48
4.3.3	Partisipasi Masyarakat	49
4.3.4	Pembangunan Desa	51
4.4	Uji Instrumen	52
4.4.1	Uji Validitas	52
4.4.2	Uji Reliabilitas	54
4.5	Uji Asumsi Klasik	55
4.5.1	Uji Normalitas	55
4.5.2	Uji Multikolinieritas	57
4.5.3	Uji Heterokedastisitas	58
4.6	Uji Regresi Linear Berganda	59

4.7	Uji Hipotesis.....	60
4.7.1	Uji t (Parsial)	60
4.7.2	Uji F (Simultan).....	63
4.7.3	Koefesien Determinasi (R²)	63
4.8	Pembahasan.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		70
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN.....		75



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Indikator Transparansi	15
Tabel 2. 2 Indikator Akuntabilitas	17
Tabel 2. 3 Indikator Partisipasi Masyarakat.....	19
Tabel 2. 4 Indikator Pembangunan Desa	23
Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	30
Tabel 3. 2 Skala Likert.....	32
Tabel 3. 3 Variabel penelitian dan definisi operasional.....	32
Tabel 4. 1 Jenis Kelamin.....	44
Tabel 4. 2 Usia	45
Tabel 4. 3 Pendidikan Terakhir	46
Tabel 4. 4 Hasil Kuisisioner Regresi	46
Tabel 4. 5 Hasil Kuisisioner Regresi	48
Tabel 4. 6 Hasil Kuisisioner Regresi	49
Tabel 4. 7 Hasil Kuisisioner Regresi	51
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitasi	53
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.....	54
Tabel 4. 10 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	56
Tabel 4. 11 Uji Multikolinieritas.....	57
Tabel 4. 12 Uji Regresi Linear Berganda.....	59
Tabel 4. 13 Uji Parsial.....	60
Tabel 4. 14 Uji F (Simultan)	63
Tabel 4. 15 Koefesien Determinasi.....	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian	25
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	42
Gambar 4. 2 Uji Histogram Normal Curve.....	55
Gambar 4. 3 Uji P-Plot.....	56
Gambar 4. 4 Uji Heterokedastisitas	58



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuisioner Penelitian.	76
Lampiran 2. Hasil Output SPSS.....	80
Lampiran 3. Surat Izin Riset	88
Lampiran 4. Surat Balasan Selesai Riset.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa merupakan sebuah program penting dan selalu menjadi prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan desa sudah pasti tidak terlepas dari lapisan masyarakat yang mendiaminya. Baik dari pemerintahnya maupun masyarakat yang ada dalam suatu desa. Desa sebagai bagian dari pemerintahan untuk setiap tahunnya pemerintah akan memberikan program alokasi dana desa untuk membiayai kegiatan operasional, program pembangunan desa maupun kebutuhan desa. Untuk itu pemerintah memberikan tanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran atau Alokasi Dana Desa (ADD).

Tercapainya pembangunan desa tentunya tidak terlepas dari bantuan langsung dari pemerintah pusat. Salah satu bentuk bantuan dari pemerintah yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat yang pemanfaatannya dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa”, (Made Wiradarma, dkk 2017).

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan dalam pengelolaan keuangan desa yang mengikuti pola keuangan daerah seperti di kabupaten, kota maupun provinsi yang terdiri dari pendapatan, pembiayaan dan belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang bertanggungjawab disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati.

Sumber pendapatan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima setiap tahunnya secara bertahap. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa yang berasal dari hasil pajak dan dana perimbangan keuangan daerah dan pusat yang diterima oleh kabupaten (Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014).

Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya”, (Mahmudi, 2015: 18). Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasidalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”, (Mardiasmo, 2006:3). Dalam tahap transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer dan tahap akuntabilitas juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan dari masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya untuk program pembangunan desa sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. Program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam implementasi atau pelaksanaan program-program pembangunan desa tersebut. Dalam pengelolaan

keuangan desa, keterlibatan masyarakat sangat penting, dimulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

Adapun desa yang menjadi objek penelitian adalah Desa Tandun Barat, Riau, yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.467 jiwa. Terkait program ataupun perencanaan yang sudah dilaksanakan di Desa Tandun Barat belum sepenuhnya terealisasi. Permasalahan yang ditemui di Desa Tandun Barat adalah kurangnya transparansi pemerintahan Desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan lemahnya akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggung jawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari ADD belum terealisasi. Ini dapat dilihat dari adanya perencanaan renovasi masjid, semenisasi jalan, pipanisasi air Pamsimas keseluruhan wilayah Desa Tandun Barat dan pembuatan jembatan yang belum terealisasi. Ada juga bantuan pembangunan rumah yang layak bagi warga belum dapat diwujudkan pemerintah desa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Transparansi Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada dilatar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan desa pada Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu?

2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pembangunan desa pada Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan desa pada Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu?
4. Apakah transparansi pengelolaan alokasi dana desa, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan desa pada Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa pada Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pembangunan desa pada Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa pada Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu.
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan alokasi dana desa, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa pada Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan diketahuinya transparansi pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa di Desa tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu, maka diharapkan pemerintah desa dapat memperhatikan pentingnya transparansi mengenai setiap program yang ada di desa serta memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Tandun Barat, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan.
2. Dengan diketahuinya akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu, maka diharapkan pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dengan menyediakan sistem informasi keuangan yang dapat dipercaya oleh pemerintah pusat dan masyarakat desa.
3. Dengan diketahuinya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu, maka diharapkan pemerintah desa dapat melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan melibatkan masyarakat pada program-program yang sudah ditetapkan.
4. Dengan diketahuinya transparansi, akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu, maka diharapkan pemerintah desa dapat lebih memperhatikan dan memperbaiki transparansi, akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan partisipasi masyarakat apakah sudah diterapkan atau tidak.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi (*Agency Theory*) merupakan hubungan yang berasal dari kontrak yang terjadi antara anggota perusahaan yakni antara principal (pemilik) dan agent (agen) sebagai pelaku utama, dalam hal ini principal adalah rakyat dan agen adalah kepala desa dan pemerintah desa lainnya (Sawitri dan Gayatri, 2021). Teori agensi menjelaskan tentang pentingnya sistem pelaporan dalam menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan masyarakat kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Sistem pelaporan dalam sektor publik harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang diatur dalam pemerintah No. 71 Tahun 2010. Pengelolaan keuangan desa mewajibkan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan melakukan pelaporan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Widagdo, Widodo, dan Ismail, 2016).

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak dan kewenangan

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparatnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas dapat terwujud apabila terdapat komitmen dari pemimpin dan seluruh staf instansi pemerintahan yang bersangkutan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa dana desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas atau kebutuhan desa dan masyarakatnya serta untuk mengawasi jalannya dana desa. Partisipasi masyarakat diartikan oleh Adi (2007:27) sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk mencapai tujuan demi kepentingan masyarakat dan menjalankan tugas untuk membangun negara. Pemerintah sebagai agen dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Teori agensi memberikan gambaran bahwa seharusnya aparatur desa (agent) dan masyarakat sebagai (principal) saling bekerja sama dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa memberikan yang terbaik bagi masyarakat lewat pemahamannya terhadap akuntansi dana desa dan masyarakat membantu mewujudkan pengoptimalaan

dana desa lewat partisipasinya. Agar dana desa dapat dijalankan sesuai dengan prosedur seharusnya.

2.1.2 Definisi Desa

a. Pengertian Desa

menurut Undang-Undang No. 6 Pasal 1 tentang desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, hak usul-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa didirikan atas prakarsa masyarakat yang memperhatikan bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat serta asal usul dari desa tersebut. Desa dapat dibentuk dari beberapa penggabungan desa atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa bahkan lebih bahkan desa dapat dibentuk diluar desa yang sudah ada.

Pemerintah Desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah pemerintah desa dijalankan oleh Kepala Desa yang dimana Kepala Desa juga dibantu oleh Perangkat Desa sebagai penyelenggaraan pemerintah desa. Selain itu, ada juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang terdiri dari RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

b. Pendapatan desa

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Bab I ketentuan umum menyebutkan bahwa pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa APDDesa terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan asli desa meliputi:

- a. Hasil usaha desa yaitu Bumdes, tanah kas desa.
- b. Hasil aset: pasar desa, pos desa, peralatan asli desa, jaringan irigasi.
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan masyarakat didalmnya yaitu berupa tenaga, barang maupun material.
- d. Pendaptan lain-lain asli desa yaitu hasil penguatan desa.

2. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Dana desa.
- b. Bagian hasil pajak daerah/retribusi Daerah
- c. Alokasi dana desa (ADD)

- d. Bantuan keuangan dari provinsi
- e. Bantuan keuangan dari kabupaten

3. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri atas:

- a. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- b. Pendapatan desa lain-lain yang sah.

c. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa dimana hal ini merupakan kewajiban desa untuk satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran dari desa sebagaimana dipergunakan dalam rangka sebagai pendanaan penyelenggaraan kewenangan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa terdiri dari beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

a. Belanja pegawai

Untuk belanja pegawai dianggarkan sebagai pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa.

b. Belanja barang

Biasanya digunakan sebagai pengeluaran atau pembelian pengadaan barang maupun jasa, yang terdiri dari: alat tulis kantor, pemeliharaan, makanan dan minuman pada saat rapat.

c. Belanja modal

Untuk belanja modal biasanya digunakan sebagai pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang dan bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

d. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa paling sedikit 10% yang bagiannya untuk desa secara proporsional.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa

berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Alokasi Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RED). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 4, apabila hal tersebut dilaksanakan maka dikenakan sanksi tegas yang diatur dalam pasal 72 ayat 6, dimana pemerintah dapat melakukan penundaan dan pemotongan sebesar alokasi dana pemerintahan setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menyatakan tujuan dari alokasi dana desa, sebagai berikut :

- 1) Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa serta pemberdayaan masyarakat
- 3) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social

- 5) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat
- 7) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber pada APBN bahwa besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot :

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa.
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa.
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan.

Bagian Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) yang digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa yang 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan untuk, sebagai berikut:

1. Pembelian alat tulis kantor
2. Pembayaran rekening listrik dan air kantor
3. Biaya potocopi dan cetak pengadaan
4. Biaya pemeliharaan kantor
5. Biaya konsumsi rapat
6. Biaya perjalanan aparat pemerintah desa dan BPD
7. Dan kegiatan lain yang dianggap penting

Untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan untuk, sebagai berikut:

1. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil
2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
3. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
4. Biaya untuk ketahanan pangan
5. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
6. Pengembangan sosial, budaya dan keagamaan
7. Kegiatan kepemudaan (karang taruna)
8. Dan kegiatan lain-lain yang dianggap penting

2.2 Transparansi

2.2.1 Pengertian Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Selain itu, Menurut Tanjung (Handayani, 2015:18), menurut beliau transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Andrianto (2007), transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh penyelenggara sebaiknya bisa diakses

langsung secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi secara luas di dalamnya.

Transparansi sendiri adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan yang sifatnya terbuka bagi masyarakat, baik itu dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang dapat diakses oleh semua pihak untuk mendapatkan informasi. Transparansi mempunyai arti keterbukaan organisasi dalam menyampaikan informasi terkait aktivitas dari pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan desa tidak bisa terlepas dari yang namanya transparansi, sehingga dengan adanya transparansi akan lebih menjamin akses atau kebebasan untuk setiap orang guna mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, bagaimana proses pembuatannya dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang akan dicapai.

2.2.2 Indikator Transparansi

Menurut (Krina, 2003 dan Nahrudin, 2017) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Indikator Transparansi

No.	Indikator
1.	Penyedia dan akses suatu informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan prosedur pertanggungjawaban.
2.	Keterbukaan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3.	Keterbukaan informasi yang berkaitan dokumen yang berkaitan dengan dokumen pengelolaan Dana Desa.

Sumbet: diolah oleh penulis (2022)

2.3 Akuntabilitas

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban dari penguasa atau unit organisasi untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya untuk dapat menjawab mengenai hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk pelaporan oleh pihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu (Ikhwandha, 2018).

Menurut Nasirah (2016) menyatakan “Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Untuk hubungan ini, membutuhkan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang akan dicapai serta bagaimana cara yang digunakan demi mencapai semua itu.

Akuntabilitas memiliki tujuan yaitu memberikan sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakatnya mengenai dana yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah dalam pemberian pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Dengan arti lain pengendalian tidak bisa berjalan efisien dan efektif jika tidak ada mekanisme akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit

kerja (dinas) kepada pemerintahan daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat ke MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam melaksanakan instansi pemerintahan, harus memahami prinsi-prinsi yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen yang harus dimiliki oleh pimpinan dan staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan dengan tujuan agar akuntabel.
- b. Adanya sebuah sistem yang bisa menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
- c. adanya tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.3.3 Indikator Akuntabilitas

Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk mengukur dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2. 2
Indikator Akuntabilitas

No	Indikator
1.	Adanya pertanggungjawaban mengenai laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.
2.	Manfaat (Efektivitas) yang harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah manfaat dari sudut pandang outcome.
3.	Adanya suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dipertimbangkan untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Sumber: diolah oleh penulis (2022)

2.4 Partisipasi Masyarakat

2.4.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan setiap orang atau masyarakat dimana masyarakat memiliki hak untuk pengambilan keputusan atau ambil bagian disetiap kegiatan penyelenggaraan suatu organisasi, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga transparansi berfungsi sebagai penyedia informasi yang cukup akurat dan harus tepat waktu mengenai kebijakan publik maupun proses pembentukannya.

Masyarakat memiliki peran yang cukup penting, sama halnya seperti kelompok swasta ataupun pemerintah. Peran penting yang dimaksud yakni partisipasi dari masyarakat. Adapun partisipasi masyarakat yang dimaksud yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk berbagai proses maupun tahapan dalam pemerintah/politik/negara. karena itu masyarakat memiliki suara untuk pengambilan keputusan, baik itu secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Dan juga masyarakat berhak menyalurkan aspirasinya dalam proses pembangunan. Peran dan kontribusi dari masyarakat sangat dibutuhkan guna mewujudkan tujuan dari pembangunan itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya mengandalkan peran pemerintah maupun kalangan swasta saja, namun harus disertai dengan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Partisipasi yang dimaksudkan adalah sebagai alat untuk memperoleh informasi berupa kondisi, kebutuhan dan sikap dari masyarakat setempat. Masyarakat diikutsertakan dalam mengikuti dan merumuskan segala sesuatu demi

mengembangkan desa. Sebab tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, setiap program dari pembangunan maupun proyek-proyek yang sudah direncanakan akan gagal.

2.4.2 Manfaat Penerapan Partisipasi

Ada beberapa manfaat dari penerapan partisipasi yaitu, sebagai berikut:

- a. Partisipasi bisa dimanfaatkan sebagai faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan yang penting, seperti perencanaan dan alokasi anggaran.
- b. Adanya keterlibatan dari masyarakat dan organisasi masyarakat sebagai tata pemerintahan bisa menjadi sumber pendekatan-pendekatan dan program yang lebih inventif dan inovatif.
- c. Keterlibatan kelompok marginal yang aktif berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif.
- d. Proses partisipasi berpotensi menjadi media komunikasi yang bisa mengurangi adanya konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif.

2.4.3 Indikator Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan pengertian dan juga unsur dari partisipasi masyarakat, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yaitu, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Partisipasi Masyarakat

No	Indikator
1.	Terdapat akses bagi masyarakat untuk menyampaikan suatu pendapat dalam proses pengambilan keputusan mengenai realisasi anggaran dana desa.

2.	Kemampuan masyarakat yang terlibat dalam suatu proses perencanaan dan pengelolaan dana desa.
3.	Adanya pengawasan masyarakat dalam realisasi anggaran pembangunan desa.
4.	Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.

Sumber: dio;ah oleh penulis (2022)

2.5 Pembangunan Desa

2.5.1 Pengertian Pembangunan Desa

Konsep dari pembangunan desa sebagaimana yang diterangkan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu tentang desa, menerangkan bahwa Pembangunan Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta mampu menanggulangi kemiskinan melalui memenuhi kebutuhan desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Menurut Sujogyo dan Sagojo seperti yang dikutip oleh Satria menyatakan bahwa dalam pembangunan desa harus dilakukan secara menyeluruh terpadu dan terkoordinasi. Didalam pembangunan desa terdapat pokok-pokok rumusan yaitu, adanya prinsip-prinsip dalam pembangunan desa, adanya poko-pokok kebijaksanaan dalam pembangunan desa dan adanya sasaran dalam pembangunan desa.

Pembangunan tercapai tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dana yang membiayai program pembangunan itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Undang Undang No 6 tahun 2014 pada pasal 71 ayat 4 bahwa ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah dengan jelas memberikan pedoman yang menjadi acuan pemerintah desa dalam mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan desa tentunya mempunyai asas atau dasar yang mengikatnya sehingga bisa berjalan sesuai dengan dasar itu sendiri. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu, transparan, akuntabel dan partisipatif (Wiratna, 2015: 27).

Pembangunan desa dilaksanakan sebagai intervensi guna mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah pedesaan maupun perkotaan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi yang sebelumnya yaitu cenderung bias perkotaan (urban bias).

Pembangunan desa merupakan upaya nyata yang dilakukan di sebuah desa untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang sifatnya fisik dan non fisik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa”, (Sanusi Bachrawi, 2004). Pembangunan masyarakat pedesaan dapat dikatakan sebuah aktivitas dimana masyarakat dapat mengidentifikasi setiap kebutuhan dan masalahnya bersama. Pembangunan pedesaan dapat diarahkan pada hal berikut ini :

1. Untuk pembangunan desa dapat memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM),
2. Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antara sektor (Perdagangan, pertanian dan industri) antara desa, antar pedesaan dan perkotaan,

3. Untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu pengelolaan pembangunan di desa dilakukan bersama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong.

Pembangunan di desa merupakan sebuah tanggungjawab dari Kepala Desa. Adapun tugas dari Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kegiatan dalam pembangunan sebaiknya dilaksanakan dalam forum Musrenbangdes, kemudian hasil dari musyawarah tersebut nantinya akan di ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) dan selanjutnya akan ditentukan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, maka Kepala Desa akan dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa bahwa Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

2.5.2 Indikator Pembangunan Desa

Dalam membangun perekonomian negeri yang kuat, keberhasilan pembangunan desa dapat dilihat dari beberapa indikator (Sugista, 2017) yaitu, sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Indikator Pembangunan Desa

sNo	Indikator
1.	Adanya aset dan keuangan yang dimiliki oleh sebuah desa serta pengelolaan keuangan yang terarah sangat menentukan tingkat pembangunan sebuah desa.
2.	Adanya aspek perekonomian dalam pembangunan desa yang ditentukan oleh sarana dan prasarana ekonomi yang disiapkan oleh lembaga perekonomian desa.
3.	Adanya fasilitas yang memadai dari desa yang menunjang segala aspek kehidupan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi Desa agar semakin maju.

Sumber: diolah oleh peneliti (2022)



2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan bahan referensi oleh penulis adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2. 5
Penelitian Terdahulu

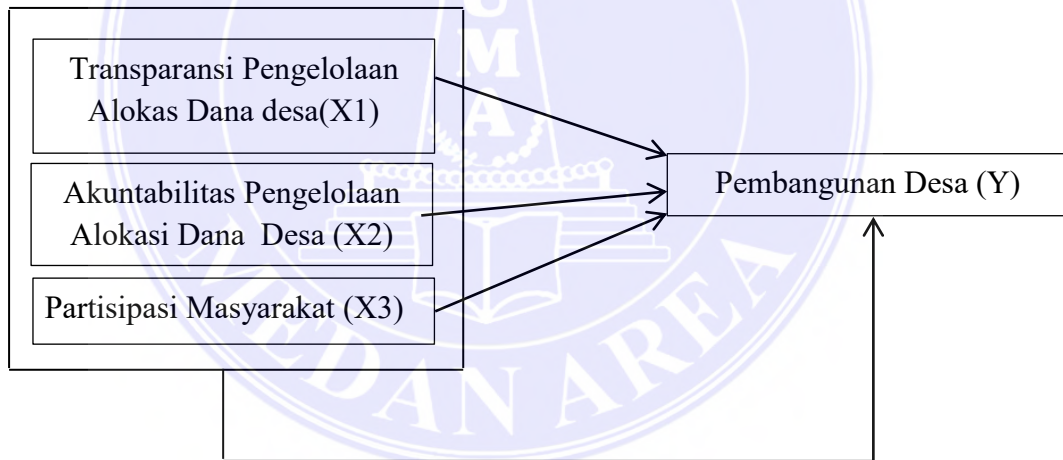
No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mohammad (2017)	Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan	Dana desa memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan desa fisik maupun pemberdayaan masyarakat.
2.	Rizky Amalia Sugista (2017)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa	Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara signifikan berpengaruh positif terhadap pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
3.	Lasa & Lestari (2018)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Pengaruh yang dihasilkan bersifat positif.
4.	Sri Wahyuni (2019)	Penerapan Akuntansi Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Kuta Bakti secara keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik. Pengaruh yang dihasilkan bersifat positif.

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada variabelnya dan lokasi penelitian.

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu model yang mampu menjelaskan hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui didalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Pada penelitian ini variabel independennya adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sedangkan variabel dependennya adalah pembangunan desa. Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa

Transparansi pengelolaan alokasi dana desa merupakan pengelolaan dana untuk pembangunan desa yang tidak dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip transparan ini penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat. Dengan adanya transparansi dan keterbukaan tentang pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintah desa mendapatkan kepercayaan publik. Selain itu, dengan adanya keterbukaan informasi memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara jelas mengenai laporan pertanggungjawaban yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Menurut penelitian Sugista (2017) mengenai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi empiris di kabupaten Lampung Selatan) menyatakan bahwa variabel transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh dan semakin tinggi transparansi pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan pembangunan desa.

H1 : Transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa pada Desa Tandun Barat.

2.8.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pembangunan Desa

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atau keharusan yang dilakukan pemerintah desa yang menjadi pelaku administrasi pembangunan

sekaligus pengelola keuangan terjadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran. Akuntabilitas financial adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan lembaga lembaga pemerintah dalam menggunakan dan publik secara efektif, ekonomi dan efisien dan dapat terhindar dari kebocoran dan pemborosan dana (Mahmudi, 2007). Sama halnya Pemerintah (Steward) Teori Stewardship Masyarakat (Principal) Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Akuntabilitas Transparansi Kebijakan Desa Partisipasi Masyarakat Pembangunan Desa Gambar 1 Rerangka Pemikiran Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 9 Nomor 5 Mei 2020 6 dengan penelitian yang dilakukan oleh Oksilawati (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bence berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.

H2 : Akuntabilitas berepengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa pada Desa Tandun Barat.

2.8.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa

Prinsip partisipatif sendiri adalah dapat tersalurkan hak, aspirasi, dan gagasan masyarakat. Dengan adanya, keterlibatan masyarakat maka dapat menentukan pengaruh kebijakan dalam pemanfaatan keuangan desa. Dan bagaimana masyarakat mampu mengawasi dan mengontrol program yang dilakukan sebagai realisasi keuangan desa yang telah diterima. Dalam penelitian Kartika (2012), meneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Tegeswetan dan desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa masyarakat desa berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan alokasi

dana desa dan terlibat dalam membangun desa untuk memajukan pembangunan desa. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Simanullang et al. (2013) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Laguboti Toba Samosir dan hasil penelitian membuktikan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pembangunan program PNPM.

H3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa pada Desa Tandun Barat.

2.8.4 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa

Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan aspek penting yang dapat mendukung terciptanya pembangunan desa yang baik dan dapat memajukan desa. Menurut hasil penelitian Siregar (2020), Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara simultan terhadap pembangunan desa.

H4 : Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Desa pada Desa Tandun Barat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Tempat Dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif (Creswell, 2014). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan hasilnya (Arikunto 2006:12). Penelitian menggunakan metode kuantitatif memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang terdapat dalam masalah penelitian ini, yaitu untuk menganalisa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa terhadap pembangunan desa berdasarkan fakta-fakta yang ada dan yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Website: www.desatandunbarat.com, Wa: 0813-2044-8831 dan No.Telepon: 0852-6566-6624.

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan mulai bulan juli 2022 atau setelah dilakukannya bimbingan dan seminar proposal.

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2022 - 2023												
		Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	apr
1.	Pengajuan skripsi	■	■											
2.	Pembuatan Proposal			■										
3.	Seminar proposal				■									
4.	Pengumpulan data dan analisis data				■	■								
5.	Penyusunan dan bimbingan skripsi						■	■						
6.	Seminar hasil								■					
7.	Sidang meja hijau													■

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

3.2 Populasi Dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016:117), Populasi adalah wilayah generalisasi yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dapat ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Tandun Barat yang berjumlah 596 kepala keluarga dengan jumlah masyarakat sebanyak 2.467 orang.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012). Menurut Bungin (2009) Sampel adalah wakil semua unit strata dan sebagainya yang ada di dalam populasi. Oleh karena itu penetapan untuk sampel ini menggunakan Rumus Slovin dari populasi yang ada, maka disusun perhitungan sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$
$$n = \frac{2.467}{1+2.467(0,01)} = 99,95 \text{ atau } 100$$

Keterangan :

n = sampel yang akan dicari

N = jumlah populasi

e = persen kelonggaran ketidakteelitian atau margin eror yang ditolerasi karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir dengan tingkat maksimum 10 %

Berdasarkan perhitungan Slovin diatas maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang, yaitu masyarakat Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu, dengan usia 20-50 tahun, pendidikan minimal SMA keatas dan warga desa tetap.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat adanya variabel independen (Sugiyono, 2018). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembangunan desa.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Variabel transparansi, akuntabilitas dan pasrtisipasi masyarakat diukur dengan skala likert skor 1-5. Data yang digunakan berupa data numerik yang diperoleh dari penjumlahan general skor setiap indikator.

Tabel 3. 2
Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiono (2018)

3.3.3 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk untuk melaksanakan mengenai cara mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi yang sangat membantu penelitian yang akan menggunakan variabel yang sama. Seperti di bawah ini :

Tabel 3. 3
Variabel penelitian dan definisi operasional

N o.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala pengukuran
1.	Pembangunan Desa (Y)	Pembangunan desa merupakan upaya nyata yang dilakukan disebuah desa untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang sifatnya fisik dan non fisik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Sanusi Bachrawi, 2004)	1. Aset dan Kekayaan yang dimiliki Desa 2. Sarana perekonomian Desa 3. Fasilitas umum yang memadai	Interval
2.	Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1)	Transparansi merupakan penyedia informasi mengenai adanya jaminan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Dewi, 2020).	1. Akses informasi yang jelas tentang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 2. Keterbukaan	Interval

			<p>proses pengelolaan alokasi dana desa</p> <p>3. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan alokasi dana desa</p>	
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X2)	<p>Akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dan memiliki kewajiban untuk melaporkan (Mardiasmo, 2012)</p>	<p>1. Pertanggungjawaban mengenai laporan keuangan</p> <p>2. Output dan outcome yang terukur</p> <p>3. Prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan</p>	Interval
4.	Partisipasi Masyarakat (X3)	<p>Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan pemerintah yang berdampak terhadap proses evaluasi dan control kinerja pemerintah serta dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang ada (Putra & Rasmini, 2019).</p>	<p>1. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan,</p> <p>2. keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan,</p> <p>3. menggunakan dan memanfaatkan hasil pembangunan,</p> <p>4. pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa.</p>	Interval

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

3.4 Jenis Dan Sumber data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, menurut Sugiyono (2013) data kuantitatif adalah metode penelitian yang meneliti populasi dan sampel yang telah ditentukan yang memiliki teknik pengambilan sampel secara random serta pengumpulan data menggunakan instrument penelitian untuk analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif atau statistic bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Samsu (2017) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama seperti melalui observasi atau wawancara kepada responden untuk tujuan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil menyebarkan kuisisioner kepada seluruh masyarakat desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu.

3.5 Teknik Analisis Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Samsu (2017) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama seperti melalui observasi atau wawancara kepada responden untuk tujuan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil menyebarkan kuisisioner kepada seluruh masyarakat desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu.

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2018:267) uji validitas merupakan adanya kesamaan dari data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang diperoleh langsung yang terjadi pada penelitian. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya

suatu kuesioner yang akan digunakan. Menurut Situmorang dan Lufti (2014:89) pertanyaan yang dikatakan valid apabila koefisien korelasi (r) hitung lebih besar dari nilai signifikan (r) tabel. Pengujian validitas dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, dinyatakan valid
2. Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, dinyatakan tidak valid

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2018:126) uji reliabilitas adalah untuk melihat sejauh mana hasil pengukuran yang menggunakan objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama. Menurut Situmorang dan Lufti (2014:92) pengujian dilakukan dengan beberapa pertanyaan yang telah dinyatakan valid dengan uji validitas setelah itu ditentukan reliabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika (α) nilai koefisien reliabilitas $> 0,6$ dapat disimpulkan instrumen tersebut reliabilitas yang baik
2. Jika (α) nilai koefisien reliabilitas $< 0,6$ dapat disimpulkan instrumen tersebut reliabilitas yang tidak baik

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji asumsi pada pemodelan regresi linear berganda sehingga data dapat dianalisa lebih lanjut tanpa menghasilkan data yang bias. Ada beberapa kriteria persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Uji Normalitas

Menurut (Sugiyono, 2018), uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut mendekati nilai rata-rata. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis Non Parametric Kolmogorov – Smirnov, guna untuk memberikan angka – angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil uji Kolmogorov – Smirnov nilai protabilitas $> 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal dan sebaliknya apabila nilai protabilitas $< 0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2013). Selain menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov juga digunakan analisis grafik. Grafik yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan histogram dan normal Probability Plot. Histogram dan normal probability plot adalah membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis histogram adalah jika grafik membentuk garis seperti lonceng maka data dikatakan normal dan dasar pengambilan analisis normal probability plot adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal maka distribusi dikatakan normal, berarti analisis regresi layak digunakan (Sugiyono, 2018).

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Sugiyono (2018) uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear suatu variabel independen dalam model regresi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dilihat dari besarnya

Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF) melalui aplikasi SPSS. Batas VIF adalah 5 dan Tolerance Value adalah 0,1 artinya nilai umum yang dapat dipakai adalah nilai Tolerance > 1 , atau nilai VIF < 5 , maka tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sugiyono (2018) uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Cara menganalisis asumsi heteroskedastisitas dengan melihat grafik Scatter Plot dimana jika ada pola tertentu seperti titik titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel. Menurut Sugiyono (2018:192) regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS versi 21. Model persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + b_3 \cdot x_3 + \dots$$

Keterangan :

Y = Pembangunan Desa

α = Konstanta

$b_1 \cdot b_2 \cdot b_3$ = Koefesien regresi untuk masing-masing variabel bebas

X1 = Variabel independen pertama Transparansi

X2 = Variabel independen kedua Akuntabilitas

X3 = Variabel independen ketiga Partisipasi Masyarakat

3.8 Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:63) bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian belum dijawab yang empirik. Uji hipotesis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Uji Parsial (Uji T)

Menurut Sugiyono (2018:194) menyatakan bahwa uji T pada penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Apabila signifikansi nilai t terhitung $\leq 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat.

2. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Sugiyono (2018:192) uji F dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila nilai signifikan $\leq 0,05$ maka dinyatakan variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Sugiyono (2018:292) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (tidak bebas). Nilai koefisien determinasi adalah nol (0) dan satu (1). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam kenyataan nilai Adjusted R^2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai Adjusted R^2 negatif, maka nilai Adjusted di anggap bernilai 0. Secara matematis jika $R^2 = 1$, maka Adjusted $R^2 = R^2 = 1$. Sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka Adjusted $R^2 = (1 - k)(n - k)$. Jika $k > 1$, maka Adjusted R^2 akan bernilai negatif

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Simpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan secara parsial transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa Tandun Barat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil signifikan 0,030 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi transparansi (X1) sebesar 0,156 yakni bernilai positif.
2. Penelitian ini menunjukkan secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa Tandun Barat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi transparansi (X1) sebesar 0,156 yakni bernilai positif.
3. Penelitian ini menunjukkan secara parsial partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa Tandun Barat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai signifikan 0,010 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi akuntabilitas (X2) sebesar 0,364 yakni bernilai positif.
4. Penelitian ini menunjukkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu, disarankan agar lebih memperhatikan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sehingga membuat masyarakat semakin percaya bahwa Desa Tandun Barat akan berkembang dengan baik dimasa depan.
2. Masyarakat Desa Tandun Barat, dengan adanya transparansi, akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa, disarankan agar lebih aktif lagi dalam berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alihar, Fadji. (2018). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. 37-39.
- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, Semarang. 1–127.
- Ardiyanti, Rika. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
- Carolina, F. A. (2017). Analisis Penerimaan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi Dalam *Perspektif Technology Acceptance Model*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Desa Bontokoraang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Benteng, Sulawesi Selatan.
- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, Sulawesi.
- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Pemerintah desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Balapulung Wetan, Jawa Tengah, 1976, 13–47.
- Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap

- Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Surabaya, 9(5), 1–20.
- Fahiroh, J. Luluk. (2022). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Pulau Madura, Jawa Timur, 11 (09), 84-92.
- Fraud, T. P., Dana, A., & Studi, D. (2022). Pengendalian Internal , dan Moralitas yang terjadi dalam Pengelolaan Desa di Desa Aman Damai Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
- G/Tsodik, D., Berhane, Y., Worku, A., Luo, D., Cheng, Y., Zhang, H. H., Ba, M., Chen, P., Li, H., Chen, K., Sha, W., Zhang, C., Chen, H. H., Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, 1(1), 1–171.
- H Kara, O. A. M. A. (2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi terhadap Pembangunan Desa Palasa. 2.7, 7(2), 107–115.
- Hinestroza, D. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sulawesi Tengah, 7, 1–25.
- Kurniawati, Y. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa. *Repository.Usm.Ac.Id*. Semarang.
- Matia andriani. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing di Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat*, 1(2), 1–13.
- Prayogi, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa) Universitas Islam Indonesi,. Jawa Tengah: *Balapulang Wetan*, 53(9), 1689–1699.

- Putri, A. R. Larasati., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jawa Tengah. 4(3), 1668-1688.
- S. S. H. d. M. Lutfi. (2014). Analisis Data Penelitian (Menggunakan Program SPSS), Medan: Usu press.
- Sirajudin, M. haris. (2019). Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. Palembang.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.PT, Bandung: Alfabeta.
- Ultafiah, Weny. (2015). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Jawa Tengah.
- Wicaksana, Arif. (2016). pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sengon (ADD), Jawa Timur. 43-54.
- . (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.



Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian.

Responden yang terhormat, bersama dengan kuisisioner ini saya:

Nama : Ramayu Vanviora

NPM : 188330092

Prodi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Universitas Medan Area

Memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi kuisisioner dalam rangka pengumpulan data guna menyusun penelitian yang berjudul **“Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Pada Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu”**

Saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I selaku masyarakat yang ada di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu untuk mengisi daftar pernyataan yang ada sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Saya menjamin kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I dan semua informasi yang terkumpul dari kuisisioner ini hanya digunakan untuk kepentingan akademisi.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk meluangkan waktu mengisi kuisisioner ini saya ucapkan terima kasih.

Petunjuk Pengisian

1. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama sebelum menjawab
2. Anda hanya dapat memberikan satu jawaban di setiap pernyataan
3. Isilah kuisisioner dengan memberikan tanda (\checkmark) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai keadaan yang sebenarnya
4. Keterangan
 - SS : Sangat Setuju = 5
 - S : Setuju = 4
 - N : Netral = 3
 - TS : Tidak setuju = 2
 - STS: Sangat Tidak Setuju = 1

Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin
 - Laki-laki
 - Perempuan
3. Usia :
 - 18 – 30 Tahun
 - 31 – 45 Tahun
 - 46 – 60 Tahun
4. Pendidikan Terakhir :
 - SD – SMP atau setara
 - SMA atau setara
 - D3/D4/S1 atau setara

KUISIONER PENELITIAN

- **TRANSPARANSI**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Adanya musyawarah rencana penggunaan alokasi dana desa.					
2.	Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai rencana penggunaan alokasi dana desa.					
3.	Adanya informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa.					
4.	Masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan alokasi dana desa.					
5.	Pengelola dana desa terbuka mengenai seluruh hasil pelaksanaan program desa kepada seluruh masyarakat.					
6.	Keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan program desa kepada seluruh masyarakat.					

- **AKUNTABILITAS**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Adanya laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan alokasi dana desa kepada masyarakat.					
2.	Tahapan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa melibatkan masyarakat.					
3.	pengelolaan dana desa telah diawasi dengan baik oleh tim pelaksana.					
4.	Adanya laporan berkala oleh tim pelaksana mengenai penerimaan alokasi dana desa dan realisasi belanja alokasi dana desa.					
5.	Adanya laporan akhir mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan alokasi dana desa.					
6.	Masyarakat dapat mudah mengakses dan mendapatkan rincian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara cepat dan tepat.					

• **PARTISIPASI MASYARAKAT**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan mengenai pengelolaan dana desa.					
2.	Masyarakat ikut berkontribusi memberikan sumbangan ide, keahlian, keterampilan, maupun tenaga untuk pelaksanaan program desa.					
3.	Masyarakat ikut memberikan masukan atau solusi terhadap masalah pelaksanaan yang timbul dalam alokasi dana desa.					
4.	Masyarakat diberikan kebebasan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa.					
5.	Masyarakat bersedia menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dari program desa.					
6.	Masyarakat bersedia menjaga, melestarikan, dan mengaplikasikan hasil dari program yang dilaksanakan desa.					

• **PEMBANGUNAN DESA**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Adanya keterlibatan masyarakat dalam mengusulkan ide dan memutuskan anggaran pembangunan yang dilaksanakan di desa.					
2.	Masyarakat ikut bekerja dalam kegiatan pembangunan desa					
3.	Masyarakat memberi masukan atau solusi terhadap masalah pelaksanaan yang timbul dalam realisasi anggaran pembangunan desa					
4.	Masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyumbang materi terhadap anggaran pembangunan desa.					
5.	Masyarakat mendapatkan manfaat kegiatan ekonomi dalam proses realisasi anggaran pembangunan desa.					
6.	Masyarakat turut menikmati keuntungan atau manfaat hasil realisasi anggaran pembangunan desa serta memelihara hasil-hasil pembangunan desa					

Lampiran 2. Hasil Output SPSS

Uji Validitas Transparansi (X1)

		Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Jumlah X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,560**	,438**	,378**	,123	,365**	,706**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,223	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	,560**	1	,448**	,473**	,170	,335**	,740**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,090	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	,438**	,448**	1	,227*	,251*	,365**	,705**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,023	,012	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	,378**	,473**	,227*	1	,079	,366**	,643**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,023		,435	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	,123	,170	,251*	,079	1	,152	,462**
	Sig. (2-tailed)	,223	,090	,012	,435		,131	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	,365**	,335**	,365**	,366**	,152	1	,672**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	,131		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah_X1	Pearson Correlation	,706**	,740**	,705**	,643**	,462**	,672**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Akuntabilitas (X2)

		Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Jumlah_ X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,500**	,293**	,182	,187	,315**	,664**
	Sig. (2-tailed)		,000	,003	,071	,062	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,500*	1	,378**	,213*	,203*	,320**	,731**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,034	,043	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	,293*	,378**	1	,208*	,030	,191	,580**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000		,038	,769	,057	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	,182	,213*	,208*	1	,328**	,200*	,567**
	Sig. (2-tailed)	,071	,034	,038		,001	,046	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	,187	,203*	,030	,328**	1	,376**	,549**
	Sig. (2-tailed)	,062	,043	,769	,001		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	,315*	,320**	,191	,200*	,376**	1	,625**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,057	,046	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah_X2	Pearson Correlation	,664*	,731**	,580**	,567**	,549**	,625**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Partisipasi Masyarakat (X3)

		Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X.6	Jumlah X3
X3.1	Pearson Correlation	1	-,067	-,095	,033	,089	,317**	,298**
	Sig. (2-tailed)		,508	,345	,745	,377	,001	,003
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	-,067	1	,257**	,419**	,230*	,385**	,643**
	Sig. (2-tailed)	,508		,010	,000	,021	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	-,095	,257**	1	,255*	,188	,209*	,544**
	Sig. (2-tailed)	,345	,010		,010	,061	,037	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	,033	,419**	,255*	1	,442**	,504**	,725**
	Sig. (2-tailed)	,745	,000	,010		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	,089	,230*	,188	,442**	1	,502**	,663**
	Sig. (2-tailed)	,377	,021	,061	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	,317**	,385**	,209*	,504**	,502**	1	,765**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,037	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah_X3	Pearson Correlation	,298**	,643**	,544**	,725**	,663**	,765**	1
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Variabel Pembangunan Desa (Y)

		Correlations						
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Jumlah_Y1
Y1.1	Pearson Correlation	1	,223*	,448**	,292*	,263**	,299**	,619**
	Sig. (2-tailed)		,026	,000	,003	,008	,003	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1.2	Pearson Correlation	,223*	1	,210*	,193	,259**	,331**	,593**
	Sig. (2-tailed)	,026		,036	,054	,009	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1.3	Pearson Correlation	,448**	,210*	1	,132	,461**	,303**	,634**
	Sig. (2-tailed)	,000	,036		,191	,000	,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1.4	Pearson Correlation	,292**	,193	,132	1	,375**	,365**	,619**
	Sig. (2-tailed)	,003	,054	,191		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1.5	Pearson Correlation	,263**	,259**	,461**	,375*	1	,330**	,706**
	Sig. (2-tailed)	,008	,009	,000	,000		,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1.6	Pearson Correlation	,299**	,331**	,303**	,365*	,330**	1	,692**
	Sig. (2-tailed)	,003	,001	,002	,000	,001		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah_Y1	Pearson Correlation	,619**	,593**	,634**	,619*	,706**	,692**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Transparansi (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,726	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Transparansi	21,37	2,660	,564	,663
Transparansi	21,39	2,584	,606	,650
Transparansi	21,37	2,478	,515	,671
Transparansi	21,47	2,635	,442	,694
Transparansi	21,06	2,986	,219	,757
Transparansi	21,34	2,550	,472	,685

Reliability Variabel Literasi Keuangan (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,680	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Akuntabilitas	21,67	2,547	,481	,617
Akuntabilitas	21,62	2,238	,522	,596
Akuntabilitas	21,22	2,638	,348	,661
Akuntabilitas	21,34	2,691	,344	,661
Akuntabilitas	21,44	2,754	,337	,662
Akuntabilitas	21,51	2,636	,438	,631

Reliability Variabel Partisipasi Masyarakat (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,648	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	21,51	2,656	,056	,702
X3.2	21,39	2,018	,395	,600
X3.3	21,36	2,192	,259	,656
X3.4	21,44	1,986	,554	,539
X3.5	21,40	2,061	,459	,574
X3.6	21,55	2,048	,642	,525

Reliability Variabel Pembangunan Desa (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,715	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	21,67	2,668	,452	,677
Y1.2	21,39	2,564	,361	,705
Y1.3	21,77	2,623	,464	,673
Y1.4	21,49	2,555	,411	,688
Y1.5	21,43	2,349	,515	,654
Y1.6	21,65	2,391	,501	,659

Regression

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Transparansi	100	11	19	30	25,60	1,902
Akuntabilitas	100	9	21	30	25,76	1,870
Partisipasi Masyarakat	100	11	19	30	25,73	1,705
Pembangunan Desa	100	9	21	30	25,88	1,855
Valid N (listwise)	100					

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	25,8800000
	Std. Deviation	1,29903366
	Absolute	,089
Most Extreme Differences	Positive	,089
	Negative	-,089
Kolmogorov-Smirnov Z		,895
Asymp. Sig. (2-tailed)		,400

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,700 ^a	,491	,475	1,344	1,816

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi masyarakat

b. Dependent Variable: Pembangunan Desa

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	167,061	3	55,687	30,813	,000 ^b
Residual	173,499	96	1,807		
Total	340,560	99			

a. Dependent Variable: Jumlah_Y1


b. Predictors: (Constant), Jumlah_X3, Jumlah_X2, Jumlah_X1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,788	2,217		2,159	,033		
Jumlah_X1	,156	,102	,160	1,727	,030	,481	2,079
Jumlah_X2	,364	,097	,367	3,758	,000	,556	1,798
Jumlah_X3	,300	,114	,275	2,635	,010	,486	2,059

a. Dependent Variable: Jumlah_Y1

Lampiran 3. Surat Izin Riset

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas :ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 1640/FEB/01.1/VII/2022 12 Juli 2022
Lamp :
Perihal : Izin Research / Survey

Kepada Yth,
Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :

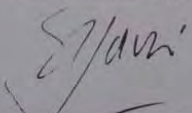
Nama : RAMAYU VANVIORA
N P M : 188330092
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Pada Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu

Untuk diberi izin Research / Survey yang Saudara pimpin selama Satu Bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.


Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang
Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni


Dr. Wan Suryani, SE, M.Si

Tembusan :
1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Peringgal

Lampiran 4. Surat Balasan Izin Riset

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**
KECAMATAN TANDUN
DESA TANDUN BARAT
Alamat : Jln. Raya Tandun Barat kode pos 28454

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 421.3/UM.TDN-BRT/2022/ 240

Lampiran :-
Hal : **Balasan Surat Izin Riset/Survey**

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

Dengan hormat,

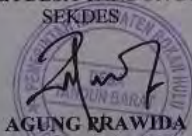
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu menerangkan dengan sesungguhnya dapat menerima mahasiswi :

Nama : Ramayu Vanviora
Asal : Tandun Barat
NPM : 188330092
Program Studi : Akuntansi

Untuk melaksanakan Riset/Survey di kantor Desa kami selama 10 hari dengan ketentuan mahasiswa tersebut dapat menaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tandun Barat
Tanggal : 26 JULI 2022
KEPALA DESA TANDUN BARAT


AGUNG PRAWIDA

Lampiran 5. Surat Balasan Selesai Riset

 **PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**
KECAMATAN TANDUN
DESA TANDUN BARAT
Alamat : Jln. Raya Tandun Barat kode pos 28454

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 421.3/UM.TDN-BRT/2022/ 240

Lampiran : -
Hal : **Pemberitahuan Riset/Survey**

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu menerangkan dengan sesungguhnya dapat menerima mahasiswi :

Nama : Ramayu Vanviora
Asal : Tandun Barat
NPM : 188330092
Program Studi : Akuntansi

Telah menjalani Riset/Survey selama 10 hari terhitung tanggal 26 Juli 2022 s/d 04 Agustus 2022.

Demikianlah Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tandun Barat
Tanggal : 26 JULI 2022
KEPALA DESA TANDUN BARAT
SEKDES


AGUNG PRAWIDA